

## **PERANAN SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO IX DALAM MENEGAKKAN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Iswantoro\*

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

<i>Abstract</i>	<b>Abstrak</b>
<p><i>This paper explains the role of Sri Sultan Hamengkubuwono IX in upholding the independence of the Republic of Indonesia. During the independence of the Sultan with the government in Yogyakarta, he always supported the Government of the Republic of Indonesia, such as sending congratulatory letters to Bung Karno and Bung Hatta the day after the proclamation of independence and in 1946 the State capital was moved to Yogyakarta because of the uncertain atmosphere in Jakarta and the invasion of the Dutch army. The office and building owned by the Sultanate were loaned out to the Republic of Indonesia government office where the government department lived. The Sultan also opened a royal treasury to finance the Government of the Republic of Indonesia in Yogyakarta. On March 1, 1949 the Sultan became one of the figures so that the attack could be realized over the Indonesian capital in Yogyakarta, proving that the Indonesian government was still effective.</i></p> <p><i>Keywords: Hamengku Buwono IX, role, independence.</i></p>	<p>Tulisan ini menjelaskan tentang peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam menegakkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di masa kemerdekaan Sultan dengan pemerintahan di Yogyakarta senantiasa mendukung Pemerintahan RI seperti mengirim surat ucapan selamat kepada Bung Karno dan Bung Hatta sehari setelah proklamasi kemerdekaan dan tahun 1946 ibukota Negara di pindah ke Yogyakarta karena suasana yang tidak menentu di Jakarta akibat serbuan tentara Belanda. Kantor dan gedung milik kesultanan dipinjamkan untuk kantor Pemerintahan RI tempat tinggal jawatan pemerintahan. Sultan juga membuka kas kerajaan untuk membiayai Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta itu. Pada tanggal 1 Maret 1949 Sultan menjadi salah satu tokoh sehingga serangan tersebut bisa terwujud menguasai ibukota RI di Yogyakarta sehingga membuktikan bahwa pemerintah RI masih efektif.</p> <p>Kata Kunci: Hamengku Buwono IX, peranan, kemerdekaan.</p>

### **PENDAHULUAN**

Sultan Hamengku Buwono IX merupakan salah satu pejuang yang mempunyai peran dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sultan Hamengku Buwono IX merupakan pemimpin daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan memerintah sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Banyak peran Sultan dalam mendukung kemerdekaan negara Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Sultan saat Belanda masih memerintah, Sultan berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh Belanda dengan cara mengubah pasal-pasal perjanjian dengan Belanda. Upaya Sultan ini tidak berhasil. Indonesia mengalami perubahan penguasa saat Belanda harus menyerahkan kekuasaan di Indonesia kepada Jepang. Pada saat Jepang berkuasa itulah Sultan berhasil mengurangi pengaruh penjajah yaitu patih dalem hanya bekedudukan sebagai pembantu Sultan tidak lagi sebagai mata-mata penjajah. Jepang mempersilahkan Sultan berkuasa penuh artinya patih dalem yang masa kekuasaan Belanda mempunyai kedudukan ganda sebagai bawahan Sultan dan bawahan Pemerintah Belanda sebagai mata-mata. Pemerintah Jepang menginginkan pemerintahan di Yogyakarta berjalan dengan lancar agar dapat membantu Jepang dalam melawan sekutu.

\*Correspondance Author: [iswantoroiswan1978@yahoo.com](mailto:iswantoroiswan1978@yahoo.com)

Article History | Submitted: August 20, 2019 | Accepted: December 23, 2019 | Published: January 16, 2020

How to Cite (APA 6<sup>th</sup> Edition style):

**Iswantoro. (2020). Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 158-181.**

**DOI: 10.30829/juspi.v3i2.5601**

Sultan sangat memberi dukungan besar kemerdekaan Indonesia. Saat kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, Sultan memberi surat mengucapkan selamat atas kemerdekaan RI kepada Sukarno-Hatta satu hari setelah Indonesia merdeka. Sultan memberikan dukungan penuh akan kemerdekaan Indonesia dan menyatakan bergabung dalam negara Indonesia. Sultan akan selalu membela kemerdekaan negara Indonesia. Presiden Sukarno sangat berterima kasih sekali dan memberikan hak keistimewaan kepada Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang kepala pemerintah daerahnya Sultan dan wakilnya Paku Alam sampai akhir hidup atau tidak ada pemilihan jadi penetapan. Pada masa kemerdekaan banyak peran Sultan dalam ikut menjaga berdirinya negara Indonesia. Pada masa awal Indonesia merdeka Belanda masih berusaha menguasai Indonesia dengan agresi militer. Sultan menjadi salah satu orang yang merencanakan serangan 1 Maret 1949 sehingga menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih ada.

Saat itu ibukota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta karena keadaan Jakarta yang tidak memungkinkan akibat serangan Belanda. Belanda berusaha menguasai Indonesia saat itu. Serangan umum 1 Maret 1949 membuka mata dunia bahwa negara Indonesia masih ada terbukti dengan tentaranya yang berhasil menguasai Yogyakarta selama enam jam dengan mengalahkan Belanda. Sultan juga berperan besar dalam membangun negara Indonesia. Banyak jabatan pernah pegang seperti Menteri Pertahanan pada Masa RIS, Menteri Negara dalam Kabinet Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia Presiden RI, Ketua Dewan Pariwisata Indonesia, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pada masa Indonesia dalam penjajahan dan awal kemerdekaan, Negara Indonesia masih lemah sehingga banyak upaya dari penjajah atau pihak-pihak lain yang ingin berkuasa secara sepihak. Sultan Hamengku Buwono IX dengan segala upaya senantiasa membantu agar Negara Indonesia tetap berdiri tegak. Sultan sebagai seorang pemimpin selalu memikirkan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu dia selalu mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam membangun bangsanya. Kebijakan Sultan selalu menyesuaikan dengan pemerintah Indonesia. Peranan Sultan dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dianggap kecil. Dalam kesempatan ini akan dibahas mengenai peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam menegakkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Lepas dari Kolonialisme**

Pada awal saat akan ditetapkan sebagai Sultan Yogyakarta, G.R.M. Dorojatun diminta oleh Pemerintah Belanda menanda tangani Kontrak Politik. G.R.M. Dorojatun tidak langsung mau menandatangani kontrak politik yang diajukan Gubernur Lucian Adam menjelang hari penobatannya sebagai Sultan Hamengku Buwono IX. Sebagai nasionalis sejati, G.R.M. Dorojatun terhadap beberapa hal terutama masalah dualisme pemerintahan di Yogyakarta (karaton dan nagari) serta mengenai kedudukan Papatih Dalem yang tidak disetujuinya. Hal inilah yang menyebabkan proses perundingan antara G.R.M. Dorojatun dan L. Adam berlangsung begitu alot dan memakan waktu yang cukup lama yaitu November 1939 – Februari 1940 (Tim Penyusun, 2017, p. 163).

Pada saat keadaan letih karena perundingan di suatu senja di akhir Februari 1940 G.R.M. Dorojatun seperti mendapat petunjuk atau wisik yang diyakininya berasal dari ayahnya. Wisik itu kurang lebih berbunyi “*Tole tekena wae, Landa bakal lunga saka bumi kene*”. G.R.M. Dorojatun sangat yakin akan kebenaran wisik itu. Maka pada malam hari itu juga G.R.M. Dorojatun langsung menemui Gubernur L. Adam. Waktu itu tidak ada perdebatan, dan pertemuan hanya berlangsung 10 menit. Setelah bertemu Gubernur L. Adam, G.R.M. Dorojatun minta disiapkan kontrak politik, dan akan segera ditandatangani. Alasan lain G.R.M. Dorojatun segera menandatangani kontrak politik adanya dugaan bahwa Belanda tidak akan lama lagi menjajah Indonesia, sebab Perang dunia II makin melibatkan Asia yang diprakarsai Jepang. Inilah yang merupakan alasan politik. Dua minggu lamanya kontrak politik disiapkan dan ditulis dalam bahasa Belanda serta di sampingnya ditulis dengan huruf Jawa dalam bahasa Jawa. Pada tanggal 12 Maret 1940, G.R.M. Dorojatun selaku Sultan Hamengku Buwono IX menandatangani kontrak politik di Trtatag Prabayeksa tanpa membaca lagi isi kontrak politik tersebut. Walaupun sebenarnya kontrak politik ditandatangani G.R.M. Dorojatun pada tanggal 12 Maret 1940, namun tanggal yang dicantumkan adalah tanggal 18 Maret 1940, tanggal dimana G.R.M. dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta (Tim Penyusun, 2017, p. 163).

Sekitar seminggu setelah penandatanganan kontrak politik tersebut acara penobatan dilaksanakan yaitu pada hari Senin Pon tanggal 8 bulan Sapar tahun Jawa Dal 1871 dan bertepatan dengan tanggal 18 Maret 1940. Pada hari penobatan Sultan Hamengku Buwono IX ada dua wartawan Indonesia yang diundang dan duduk sejajar dengan para pejabat Belanda. Mereka adalah R. Roedjito dan Bramono dari majalah Pustaka Timur dan Mardi Mulyo. Sebelumnya pada upacara-upacara kenegaraan pemerintah Belanda tidak perlu mengundang pers nasional (Tim Penyusun, 2017, p. 163).

Pada saat itu secara resmi G.R.M. Dorojatun masih berstatus pangeran, belum putra mahkota, sehingga waktu itu dilakukan sekaligus dua upacara penobatan. Tepat jam 11.00 WIB G.R.M. Dorojatun dinobatkan sebagai putra mahkota Kasultanan Yogyakarta dengan gelar *Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram*. Lima menit kemudian dinobatkan menjadi Sultan Kasultanan Yogyakarta dengan gelar *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ingalaga Ngadurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah kaping IX*. Setelah upacara penobatan selesai lalu dibunyikan tembakan salvo dan dentuman meriam sebanyak 13 kali, dan dilagukan gendhing monggang dengan khidmad. Setelah itu Sultan Hamengku Buwono IX duduk di sebelah kanan Gubernur Lucian Adam karena statusnya sudah sebagai Sultan. Kemudian dalam pidatonya yang pertama sebagai sultan Yogyakarta segera disampaikan dengan bahasa Belanda yang terjemahan dalam bahasa Indonesianya antara lain.

“...sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa barat dan timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertamata-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam keraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkalah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk

kepentingan Nusa dan Bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya.”  
(Tim Penyusun, 2017, p. 165)

Berdasarkan pidato tersebut pada kata-kata terakhir dapat diambil makna bahwa Sultan bekerja sebagai di Raja Yogyakarta ditujukan untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Negara yang dimaksud adalah Negara dan rakyat Indonesia yang ia buktikan dengan dukungan ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan siap membela demi Indonesia.

Pemikiran lain Sultan dapat disimak dalam pidato radio yang diucapkan pada tanggal 12 Desember 1941 pukul 18.30, dua bulan sebelum Jepang memasuki Yogyakarta. Dalam pidato itu tampak pemikirannya tentang kehidupan bermasyarakat orang Jawa yaitu mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang banyak dengan dasar cinta sesama, pidato beliau dalam bahasa Jawa tapi sudah diterjemahkan sebagai berikut:

“...Menurut pemikiran saya kewajiban setiap orang harus memperhatikan keperluan orang banyak, apa saja yang menjadi kewajibanmu untuk kebutuhan orang banyak, apa saja yang menjadi kewajibanmu untuk kebutuhan orang banyak, sedapat mungkin harus kamu utamakan. Maka dari itu betapapun kecilnya, andaikan rantai dapat diumpamakan gelang, jika gelang tadi tidak baik hubungannya, tentu rantai tadi putus, sehingga mengakibatkan kesengsaraan banyak. Maka dari itu ingatlah sungguh-sungguh akan kewajibanmu terhadap orang banyak...”

“...Janganlah kamu mendengarkan pembicaraan barang siapa yang tidak berwenang memerintah kamu dan tidak berkewajiban memberitahu kepada kamu, jangan kamu tergiur omong kosong yang akan merusak ketentraman...”

“...Dan percayalah kepada upaya pegawai negeri yang wajib membela serta membantu kamu, jika perlu saya akan membantu secara pribadi...”

“...rakyatku semua, marilah kita berbagi tugas: kamu menunaikan kewajibanmu, saya menunaikan kewajiban saya...” (Tim Penyusun, 2017, p. 165-166)

Berdasarkan cuplikan pidato Sri Sultan Hamengku Buwono IX tampak sekali bahwa Sultan tentang birokrasi pemerintahan merupakan perpaduan antara unsur tradisional dan unsur baru dengan tujuan untuk melayani rakyat. Seorang dalam tindakannya harus memikirkan kepentingan orang banyak tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, apalagi jika menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya seseorang itu harus selektif saat mendengar pembicaraan seseorang. Perlunya mempercayai pegawai pemerintah karena memang tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Orang harus melaksanakan tugasnya masing-masing secara baik.

Di dalam kontrak politik ini juga dinyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Hindia Belanda dan Hindai Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda karena Sultan mengakui kekuasaan ratu Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. Secara struktural di lingkungan pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta. Sultan tetap diakui sebagai penguasa tertinggi di Yogyakarta dengan diawasi oleh Gubernur Belanda. Gubernur Belanda terakhir bertugas di Yogyakarta adalah L. Adam yaitu pada masa Sultan Hamengku Buwono IX naik tahta (Tim Penyusun, 2017, p. 116).

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam menjalankan roda pemerintahan mengacu pada isi kontrak politik tersebut. Walaupun sebenarnya tidak semua isi kontrak politik itu disetujui oleh Sultan Hamengku Buwono IX terutama dalam hal adanya dwi kesetiaan Papatih Dalem. Masalah ini sebenarnya yang ditolak oleh sultan dalam negosiasi dengan L. Adam sebelum dilakukan penandatanganan kontrak politik. Namun akhirnya oleh L. Adam tetap dicantumkan dalam kontrak politik dan tercantum pada pasal 13 yang kurang lebih bunyinya:

“Dalam menjalankan tugas kekuasaannya atas kasultanan, maka sultan dibantu oleh seorang papatih dalem yang setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan sultan, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Pejabat tinggi ini dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggung jawab baik kepada pemerintah Hindia Belanda maupun kepada Kasultanan.” (Atmakusumah, 1982, p. 63)

Hal ini membuat seolah-olah terdapat dua pemerintahan di Yogyakarta yaitu pemerintahan karaton yang berpusat di keraton kasultanan dan pemerintahan nagari yang dikontrol oleh Gubernur Jenderal yang berpusat di Kapatihan.

### **Menjadikan Pemerintahan yang Lebih Mandiri**

Saat Jepang menduduki Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1942, pertama-tama Jepang berunding dengan Gubernur L. Adam. Setelah berunding selama dua hari Gubernur mengeluarkan pernyataan yang dimuat di surat kabar Mataram tanggal 7 Maret 1942. Isinya menyatakan bahwa dia memegang kekuasaan *Gewest* Yogyakarta bersama dua *Zelfbestuurder*. Tugas utama Gubernur menjaga keamanan. Dia memperingatkan orang-orang Jawa yang bertindak tidak baik akan ditindak keras oleh polisi, dan mereka dilarang pukul di jalan-jalan. Pada hari pertama pendudukan Jepang, di kota Yogyakarta terjadi perampokan terhadap barang-barang milik Belanda dan orang asing di kamar bola (di muka Seni Sono sekarang) dan toko-toko oleh orang-orang Jawa. Dalam keadaan demikian sultan menggunakan kesempatan untuk mendekati rakyat dan memperingatkan secara langsung. Meskipun tidak semuanya, namun banyak orang yang dengan senang hati mengembalikan barang itu. Di hari berikutnya Sultan memerintah papatih dalem K.P.P.H. Danurejo VIII untuk mengumumkan wara-wara yang isinya mengajak rakyat menjaga ketenteraman dan menaati perintah, supaya tidak mendapat hukuman yang berat dan tidak mencemarkan nama *nagari* dan Sultan sendiri (Suwarno, 1994, p. 92).

Berdasarkan peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan militer tanggal 7 Maret 1942, maka pada tanggal 23 Maret 1942 Gubernur Hindia Belanda di Yogyakarta diturunkan pangkatnya menjadi Residen Yogyakarta dan menjadi bawahan Gubernur Semarang. Sebagai residen dia digunakan Jepang untuk menjaga ketertiban, sementara Jepang mengambil alih kekuasaan untuk mengurus sumber bahan mentah guna melanjutkan perang melawan sekutu. Sementara itu Jepang hanya mendirikan *Gunseibu* (kantor pengawas), yang dengan maklumat-maklumatnya sedikit demi sedikit mengambil alih kekuasaan sambil menunggu peraturan pemerintah pendudukan yang permanen di Batavia (Suwarno, 1994, p. 92).

Sultan mengadakan komunikasi langsung dengan masyarakat luas untuk mencari dukungan penrubahan birokrasi pemerintahan yang dirasanya dapat segera dimulai. Pada tanggal 19 Mei 1942 Sultan menerima tujuh ratus orang dari bermacam-

macam golongan yang masuk ke karaton di bawah pengurus perkumpulan batik. Mereka bermaksud menyatakan kesetiannya kepada Sultan dan mendoakan panjang usia dan tetap menduduki tahtanya. Mereka juga mengharapkan dalam zaman baru ini Sultan menjadi pelindung kerajaan Yogyakarta khususnya. Kurang dari satu bulan datang lagi delapan ratus orang yang terdiri atas anggota dan pengurus Persekutuan Pengusaha Batik Bumi Putera (PPBBP), pemuda PPBBP, Kemajuan Ekonomi Indonesia (KEI), Persatuan Wanita Indonesia, Wanita Utama, Istri Indonesia, Ikatan Muhammadiyah cabang Mataram, dan sebagainya. Kelompok ini dipimpin oleh Jayengkarso, Ketua PPBBP, Sultan menerima mereka dengan sangat gembira dan setiap perkumpulan diminta untuk menceritakan tentang perkembangan perkumpulannya (Suwarno, 1994, p. 93).

Jepang menjalankan politik ekonominya, agar barang-barang tidak keluar dari Yogyakarta dan harga tetap stabil, maka sultan mulai menjaga dan melindungi rakyat desa yang lemah dengan menginstruksikan kepada pangreh praja agar mencegah petani miskin menjual tanahnya, kalau tidak terpaksa sekali. Kalau sungguh-sungguh terpaksa diperintahkan kas desa membeli tanah itu dan memberi kelonggaran kepada si penjual untuk membeli kembali di kelak kemudian hari. Dengan demikian petani tetap merdeka dan tidak dicengkeram oleh kaum pemilik uang. Instruksi ini tidak hanya diberikan begitu saja, tetapi disertai kebijaksanaan yang membantu secara nyata. Mereka yang sungguh miskin dan tidak mendapat bantuan dari keluarganya atau badan lain, akan diberi bantuan oleh Sultan dari daftar sipil (kas karaton) dan kasultanan. Untuk itu pengurus kampung diperintahkan mendaftarkan keluarga-keluarga tersebut. Selanjutnya dengan keterangan mantra pangreh praja disampaikan kepada Sultan, sehingga mereka dapat dibantu. Dalam tindakan itu Sultan telah melepaskan pemerintahan nagari yang dijalankan oleh papatih dalem dari tangan penjajah, sebab sultan sudah mengatur penggunaan kas kasultanan, yang dulu dikontrol oleh penjajah. Dalam penggunaan kas itu rakyat kecil mendapat prioritas sesuai dengan solidaritasnya terhadap pembantu rumah tangga keluarga Belanda yang pernah disaksikannya mendapat perlakuan tidak adil waktu di masih bersekolah dulu (Suwarno, 1994, p. 93-94).

Pada bulan Juni dan Juli Jepang mulai meninjau obyek ekonomi dan kesenian serta mengadakan propaganda di kalangan pangreh praja dan rakyat. Pada bulan dua orang Jepang dari Batavia datang ke Yogyakarta mengunjungi ketua PPBBP untuk membicarakan masalah batik. Pada bulan Juli datang juga Nakayama, ahli seni tari untuk mendokumentasikan tari Jawa yang ditarikan oleh perkumpulan Tari Kridho Bekso Wiromo di Dalem Pujo Kusuman (Tejo Kusuman). Hal lain, Pembesar *Gunseibu* mulai meninjau beberapa daerah di Kulonprogo untuk meneliti perusahaan rakyat, seperti gula, tenun, dan mangan di Kliripan. Kolonel Sato yang merupakan Pembesar Polisi Yogyakarta mengajak B.P.H. Suryodiningrat mengunjungi konferensi pangreh praja di Bantul dan mengadakan propaganda bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa Asia. Mereka di bawah pimpinan bangsa Jepang diajak melenyapkan bangsa kulit putih dari Asia (Suwarno, 1994, p. 94).

Sultan tidak tinggal diam melihat gerakan Jepang seperti tersebut di atas. Dia setiap Minggu pergi berkuda ke desa-desa dengan diiringi saudara-saudaranya. Dengan demikian hubungan dengan rakyat semaki erat. Kecuali itu lewat Bupati Bantul Sultan

mengirim R.Ng. Kartosudarman, pemeriksa sekolah kawula kasultanan untuk mengadakan propaganda di pertemuan-pertemuan para pangreh praja di tingkat kawedanan. Propaganda itu diadakan bulan Juli 1942 di Kotagede, Godean, dan Pandak, Bantul. Dalam propaganda ini yang disampaikan adalah inti pidato Sultan yang pernah disiarkan oleh MAVRO (*Mataramsche Vereeniging voor Radio Omroep*) pada tanggal 12 Desember 1941 dan seruan Sultan waktu berada di tengah-tengah rakyat yang mengadakan pengambilan barang-barang di kamar bola dan toko-toko Belanda. Di depan pangreh praja, lurah, dan pegawai desa di kawedanan Kotagede, R.Ng. Kartosudarman mengatakan (tulisan disesuaikan dengan ajaan yang disempurnakan):

“...Semua pegawai negeri waktunya harus bekerja giat menetapi kewajiban, bekerja untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat, jadi tidak untuk diri sendiri berdasarkan kesucian dan kejujuran hati. Kepentingan bersama harus diutamakan daripada kepentingan diri sendiri, lebih-lebih sebagai pegawai negeri harus dapat menyesuaikan diri dengan semangat baru yang berkobar-kobar meliputi seluruh Asia ini.” (Suwarno, 1994, p. 94).

Bulan Maret sampai bulan Agustus digunakan oleh Jepang untuk masa persiapan dan belum diadakan peraturan yang definitif tentang pemerintahan. Demikian juga Sultan baru mempersiapkan rakyat Yogyakarta dan meletakkan dasar-dasar hubungan timbal balik dengan rakyat sebagai persiapan untuk mengadakan perubahan pemerintahan yang sejak penobatan sudah dipikirkannya. Tindakan-tindakan Sultan pada masa persiapan ini kadang-kadang merupakan tandingan, meskipun kelihatannya searah dengan tindakan Jepang. Tindakan Sultan yang langsung berkaitan dengan pemerintahan pada masa persiapan ini adalah mengganti 24 nama kantor yang berbahasa Belanda dengan Bahasa Sansekerta, misalnya *weiterleiding* menjadi Tirta Marta, *Agrarische Zaken* menjadi Paniti Kisma, *Archief* menjadi Radya Kintaka, dan sebagainya. Pergantian ini dilakukan pada tanggal 22 Mei, sebelum Jepang menginstruksikannya. Inisiatif perubahan ini jelas dari Sultan, sebab nama-nama baru itu dibuat oleh parentah luhur, yang membuat surat-surat resmi Sultan untuk pihak luar, baik keluarga maupun instansi-instansi luar karaton. Parentah luhur menyampaikan nama-nama itu kepada nagari yang dipimpin oleh pepatih dalem. Dari nagari dikirimkan ke parentah hageng karaton untuk diketahui lewat kawedanan Kori, yang merupakan penghubung antara birokrasi pemerintahan nagari dan karaton (Suwarno, 1994, p. 95).

Mendekati waktu pengaturan seluruh Jawa dengan hukum tata Negara yang positif, Jepang memberitahukan rencananya kepada Sultan. Hal ini tampak dalam dokumen yang ditemukan di arsip keraton Yogyakarta yang berjudul Rencana Tatanegara di Tanah Jawa. Dalam dokumen itu terdapat catatan sebagai berikut: (penulisan ejaan sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan).

“Berhubung dengan kehendak Pemerintah Bala tentara dai Nippon akan membentuk tatanegara buat seluruh tanah Jawa sebagai sebuah negara, maka di sini diterangkan bahwa dengan hajat itu kita mufakat. Akan tetapi dari pendapatan kita tatanegara itu harus dibentuk sebagai kerajaan. Adapun alas an-alasannya sebagai berikut: 1. Menurut sejarah di seluruh Tanah Jawa tatanegara yang asli ialah kerajaan, 2. Sebagian besar penduduk di tanah Jawa memandang keraton itu sebagai pusat dari kesenian dan peradapan, umumnya pusat kebudayaan, 3. Tatanegara kerajaan itu sesuai dengan perasaan sebagian besar dari penduduk tanah Jawa. Dengan adanya tatanegara sebagai kerajaan, maka mudahlah akan tercapai cita-cita akan menambah teguhnya keamanan, ketentraman hidup, dan kemakmuran rakyat ....” (Suwarno, 1994, p. 95)

Jika kerajaan Jawa sudah terbentuk Sultan mengusulkan ketiga kerajaan yang rajanya tidak terpilih sebagai maharaja, tetap dilestarikan sesuai dengan hak-hak sejarahnya, tetapi harus menandatangani perjanjian dengan kerajaan Jawa tersebut. Tiga kerajaan Mangku Negaran, Paku Alaman, Surakarta atau Yogyakarta, yang tidak terpilih menjadi maharaja Jawa. Dalam struktur organisasi Sultan mengusulkan adanya empat lembaga Negara yaitu:

- 1) Badan menteri Negara (*Cabinet council*)
- 2) Sri Maharaja (*King*)
- 3) Badan Pertimbangan Negara (*Privy council*)
- 4) Balai Perwakilan Negara (*Parliament*), yang terdiri atas Balai Mulia dan Balai Rakyat (Suwarno, 1994, p. 96).

Sri Maharaja memegang kekuasaan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar (*Angger Dhasar Tatanegara*) dan tak dapat disalahkan. Badan menteri negara bertugas membantu Sri Maharaja dalam menjalankan pemerintahan, diangkat oleh Sri maharaja, yang dipimpin Perdana Menteri. Badan Pertimbangan Negara diangkat oleh Sri Maharaja bertugas memberikan pertimbangan. Badan Perwakilan terdiri atas Balai Mulia yang diangkat Sri maharaja dari keluarganya, bangsawan, dan mereka yang berjasa kepada Negara, sedangkan anggota Balai Rakyat di pilih oleh rakyat berdasarkan undang-undang (*angger*) pemilihan (Suwarno, 1994, p. 96).

Rencana Tatanegara di Tanah Jawa itu tidak diterima seluruhnya oleh Jepang, tetapi rupanya dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan undang-undang tata pemerintahan untuk Jawa, dan Sultan tentu berusaha sedapat mungkin mewujudkannya dalam mengadakan perubahan birokrasi Kasultanan Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang itu.

Menjelang keluarnya Undang-undang No. 27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah, Sultan Hamengku Buwono IX di panggil ke Batavia. Surat panggilan ini diterimanya pada tanggal 6 juli dan dijawab pada bulan 8 bulan yang sama. Dalam surat jawaban ini Sultan mengusulkan hari-hari yang dianggapnya baik untuk berangkat ke Batavia, pengiring serta perlengkapan yang menyertai serta dibawa Sultan ke Batavia, pengiring serta perlengkapan yang menyertai serta dibawa sultan ke Batavia, permintaan tiga mobil untuk angkutan, tempat penginapan, dan acara yang diusulkan oleh Sultan. Dalam bagian akhir suratnya Sultan mengusulkan empat masalah untuk dibicarakan dan diterangkan kepadanya, yaitu:

- 1) Aturan umum (*Algemeen verhoeding*) antara pemerintah *Dai Nippon* dan *nagari* Kasultanan
- 2) Yogyakarta,
- 3) Aturan keuangan (*Financieele Verhouding*)
- 4) Sifat politik umum *Dai Nippon* (banyak demokratis atau fascisnya)
- 5) Kekayaan (*Financieele vermogen*) *nagari* kasultanan yang berupa uang di *'sLandkas*
- 6) *obligaties de Javasche Bank*.

Dari pemikiran, tindakan, dan isi surat jawaban tersebut tampak bahwa Sultan selalu berusaha melepaskan diri dari pengaruh Jepang dan melawannya secara diam-

diam. Hal ini diakuinya secara eksplisit dalam sumpahnya waktu dilantik menjadi Yogyakarta *Koo Kooti* (Sultan Daerah Istimewa Yogyakarta) pada tanggal 1 Agustus 1942. Pada waktu itu Sultan dinobatkan lagi menjadi Yogyakarta *Koo Kooti* oleh Jepang di Istana Merdeka (sekarang) (Suwarno, 1994, p. 98).

Jalannya upacara penobatan Sultan menjadi Yogyakarta *Koo Kooti* oleh Jepang dilaporkan *Kan Poo* sebagai berikut (ejaan sudah disesuaikan dengan ejaan disempurnakan):

“Pada hari Sabtu pagi tanggal 1 Agustus 2602, pada jam 10 pagi tibalah *Jokya-Koo* di istana *Rijkswijk* (Istana Negara), disertai pengiringnya.”

“Kemudian dilakukan upacara penobatan *Jokya-Koo* (Sultan dulu). Upacara itu dibuka dengan pidato *Gunseikan* Jendral Mayor Okasaki, dalam mana dinyatakan, bahwa Sultan dulu diangkat menjadi *Jokya-Koo*. Setelah itu Yang mulia Panglima Perang Imamura berpidato yang mengandung isi beberapa nasehat untuk cara menjalankan pemerintahan.”

“Kemudian *Jokya-Koo* bersumpah setia dengan sepenuh-penuh hati pada pemerintahan *Dai Nippon*. Oleh Jendral-Mayor Okasaki kemudian disampaikan piagam yang mengandung perintah dan petunjuk untuk mengatur dan mengurus daerah *Jokya-Koo*. Setelah selesai upacara itu, lalu semua meninggalkan istana *Rijkswijk*.” (Suwarno, 1994, p. 98-99)

Piagam yang disebut dalam catatan itu adalah perintah bala tentara *dai Nippon* yang ditandatangani *dai Nippon* gun seireikan Hitosi Imamura, yang terjemahannya disimpan di dalam arsip karaton Yogyakarta. Piagam itu berisi delapan pasal: Pasal 1 dan 2 menyatakan pengangkatan Hamengku Buwono IX menjadi *Koo* (Sultan) oleh *dai Nippon* gun seireikan dan suatu perintah untuk mengurus pemerintahan *Kooti* sesuai dengan perintahnya. Pasal 3 menyebutkan wilayah *kooti* sama dengan wilayah kasultanan Yogyakarta dulu. Pasal 5 mengatur bahwa *Koo* wajib memerintah *kooti* untuk memajukan kemakmuran penduduk *kooti* umumnya. Pasal 4 dan 6 menegaskan bahwa hak istimewa yang dulu dimiliki *kooti* serta badan-badan pemerintahan yang telah ada di *kooti* dilestarikan. Pasal 7 menyatakan bahwa gun seireikan akan membentuk *kooti zimu kyoku* (kantor urusan kesultanan) untuk memimpin dan mengawasi Sultan. Pasal 8 mengisyaratkan petunjuk lebih lanjut akan dikeluarkan oleh pembesar pemerintah balatentara *dai Nippon* (*gunseikan*) atas nama *dai Nippon gun seireikan*. Perintah tersebut disertai nasehat dari *dai gun seireikan* yang intinya memberi keyakinan bahwa serangan tentara Jepang telah berakhir dan kekuasaan Amerika, Inggris, serta Belanda telah lenyap. Sekarang tugasnya yaitu melenyapkan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda yang mengungkgung bangsa Asia, sehingga mereka dapat menikmati kemakmuran dan keamanan yang kekal. Untuk itu Sultan diharuskan mentaati perintah *dai Nippon gun seireikan* dan mengumumkan kepada penduduk Yogyakarta agar mereka mau bekerja sama dengan Jepang (Suwarno, 1994, p. 99).

Berdasarkan perintah tersebut dapat dilihat bahwa Jepang memberi kelonggaran kepada Sultan untuk mengatur pemerintahan Yogyakarta. Bagi Jepang yang penting adalah Sultan dapat menyampaikan maksud Jepang untuk mendapatkan tanggapan positif dari rakyat Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan perangnya.

Petunjuk teknis yang diberikan oleh *gunseikan* Seizaburo Okasaki menegaskan bahwa *Koo* diangkat atau dipecat oleh *dei Nippon Gun Seireikan*. Somutyookan (pembesar urusan umu/pepatih dalem) diangkat oleh *gun seireikan* dari antara pegawai *Koo* dan fungsinya membantu *Koo*. Berbeda dengan surat perjanjian, petunjuk itu tidak mengatur pertanggungjawaban pepadat dalem yang bersifat ambivalen. Surat perjanjian dengan tegas mengatur *pepatih dalem* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab baik kepada pemerintah Hindia Belanda maupun kepada Sultan. Tentu saja sebagai penjajah Jepang selalu mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh Sultan. Tindakan Jepang ini salah satu sebab yang memungkinkan Sultan mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta sesuai dengan pemikirannya (Suwarno, 1994, p. 100).

Sesudah *gun seireikan* memberikan pidato nasehatnya, Sultan mengucapkan sumpah setia kepada pemerintah Jepang. Dalam mengucapkan sumpah sultan menyelipkan kalimat yang isinya bahwa ketika tentara *Nippon* Jepang menyerang tanah Jawa ada perlawanan karena adanya desakan dari balatentara Belanda bukan kemauan sendiri. Kalimat tersebut diucapkan dimungkinkan untuk melunakkan hati pemimpin-pemimpin Jepang yang masih memercayainya untuk memimpin Yogyakarta.

Sesudah Sultan diangkat menjadi *Koo* oleh Pemerintah Jepang dan diberi aturan serta petunjuk pelaksanaan yang jelas, maka dia mulai menentukan sikapnya secara tegas. Aturan serta petunjuk pelaksanaan dari Jepang jelas lebih memberi kelonggaran kepada Sultan untuk aktif menjalankan pemerintahan, meskipun hakikatnya penjajahan tetap dipertahankan oleh peraturan itu. Dalam pemerintah balatentara *dai Nippon* dwi kesetiaan pepadat dalem tidak diatur. Kekuasaan menjalankan pemerintahan diserahkan kepada *Koo* bawah pengawasan pemerintah Jepang (Suwarno, 1994, p. 100).

Kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang itu dimanfaatkan oleh Sultan untuk mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta sesuai dengan semangat Jepang. Untuk itu Sultan memperhentikan pegawai-pegawai yang berkebangsaan Belanda, meskipun untuk sementara mereka masih dipertahankan sebagai penasihat bagi penggantinya, agar tugas dapat dialihkan secara wajar. Dengan surat keputusan No. 68 tanggal 2602, sultan memberhentikan J.J. Dendulk, *kepala pratistarta* (Dinas akuntan) dan wakil kepala anggaran pendapatan dan belanja kasultanan, dijadikan penasehat keuangan nagari; Ir. E. G. Van Der Beek ketua *Radya Suyasa* (pekerjaan umum) dijadikan penasehat *Radya suyasa*; J.J. Bellingwout yang diperbantukan untuk mengurus *Tirta marta* (Air minum) dan perencanaan kota dijadikan penasehat *tirta marta* dan *racana praja* (perencanaan kota); dan M.J.A. Peperzak ketua kadester dan *citra danarta* (pemegang pembukuan anggaran). Kedudukan J.J. Dendulk diganti B.P.H. Pakuningrat dan K.R.T. Sumodiningrat, Ir. E.G. van der beek diganti Ir. K.R.T. Prbodiningrat, J.J. Bellingwout diganti Ir. K.R.T. Mertonegoro, dan M.J.A. Peperzak diganti Ir. Sutomo Wongsocitro (Suwarno, 1994, p. 101).

Tanggal 4 September 1942 pemerintah pendudukan Jepang merasa sudah lebih mantap, maka *gunseibu* diganti *Kooti Zimu Kyoku*. *Kooti Zimu kyoku tyookan* pertama ialah Keiki Jamanouchi. Pada tanggal 11 September pepadat dalem K.P.H.H. Danurejo dilantik menjadi *Kooti Soomu Tyookan*. Pelantikan ini dihadiri *Gunseikanbu Soomubu-*

Tyoo (Kepala kantor urusan umum) Nakayama. Dengan demikian birokrasi pemerintahan Yogyakarta mendapat legalisasi dari pemerintah Jepang. Meskipun masih tetap di bawah pengawasan penjajah Jepang, setidaknya Sultan dapat memusatkan kekuasaan ditangannya dan pepatih dalem sungguh-sungguh menjadi pelaksana perintah Sultan. Ini berarti Sultan memegang kekuasaan pemerintahan karaton dan pemerintahan nagari.

Sultan dalam mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan tidak mengabaikan kedua birokrasi pemerintahan yang ada, tetapi justru melestarikan keduanya dan memanfaatkan birokrasi pemerintahan karaton untuk mengembangkan pemerintahan nagari. Langkah yang ditempuh yaitu pada tanggal 22 Oktober 1942 Sultan menggabung Parentah Luhur dan kawedanan Kori menjadi kawedanan kori baru. Kawedanan kori baru dipimpin oleh B.P.H. Puruboyo, saudara tua Sultan. Kawedana kori ini digunakan Sultan sebagai jembatan untuk mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, yang sudah dimulainya dari birokrasi pemerintahan karaton.

Sultan menyadari bahwa perubahan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan lancar kalau masyarakat tidak dibina. Maka, pada akhir Agustus Sultan sudah menghapus larangan memakai selop, sandal, tongkat, topi, dan payung di pamengkang sitihinggil utara, kemandungan selatan, dan pamengkang sitihinggil selatan. Demikian juga memberi hormat dengan jongkok kepada sultan di luar karaton dihapuskan, dan diganti dengan memberi hormat sambil berdiri (Suwarno, 1994, p. 101-103).

Di bidang pendidikan, sekolah rakyat keputran yang semula hanya menerima anak-anak abdidalem sebagai muridnya, pada bulan agustus itu mulai menerima anak-anak kawuladalem. Bulan berikutnya dibuka sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT). Guru-guru dan lulusan sekolah-sekolah itu nanti akan menjadi persediaan birokrat-birokrat yang akan mendukung perubahan birokrasi pemerintahan yang diadakan oleh Sultan.

Sultan juga berhubungan dengantokoh dan kelompok sosial yang siap memberi dukungan untuk mengadakan pembaharuan birokrasi pemerintahan Yogyakarta. Pada bulan Oktober selama satu jam Sultan menerima Ki Hajar Dewantara yang datang bertamu untuk memberitahu bahwa dirinya akan memangku jabatan di Jakarta dan memperkenalkan wakilnya di Yogyakarta yaitu Nyi Hajar Dewantara, Ki Pronowidagdo, dan Sudarminto.

Pada bulan November Sultan dengan saudara-saudaranya mengunjungi poliklinik dan rumah yatim Muhammadiyah di tungkuk. Sultan juga mengunjungi bangunan-bangunan Muhammadiyah di secodiningratan, Kauman, Notoprajan, Patangpuluhan, Purwodiningratan, dan gedung pusat Muhammadiyah di Ngabean. Dia disambut Pengurus Besar Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo. Muhammadiyah merupakan salah satu perkumpulan yang disahkan oleh Kooti Zimu Kyoku Tyookan di Yogyakarta. Perkumpulan lainnya yang disahkan yaitu Kemajuan Ekonomi Indonesia serta bagian-bagiannya, perkumpulan kawula ngayogyakarta, perkumpulan sepakraga Indonesia mataram, Ikatan sport Indonesia, perkumpulan bola keranjang Indonesia

mataram, sangkara muda, *hwa-chiao chunghui*, dan *Nippon gunjin guraksa* (balai mataram) (Suwarno, 1994, p. 106).

Pada akhir 1942 Sultan menyusun birokrasi pemerintahan yang sesuai dengan pemikirannya dalam situasi dan kondisi yang dimungkinkan oleh Jepang. Dalam birokrasi ini Sultan menduduki jabatan tertinggi yang bertanggung jawab kepada *saiko sikikan*. Di bawah sultan terdapat *kawedanan kori*. *Kawedanan kori* inilah yang menyampaikan perintah Sultan kepada *pepatih dalem* untuk dilaksanakan. Untuk melaksanakan perintah Sultan itu diciptakan aparat pemerintahan yang diorganisasi dengan pembagian tugas secara horizontal dan vertical yang langsung dikoordinasi *pepatih dalem* Danurejo VIII. Untuk membatu tugasnya ia dibantu agya praja. Kecuali itu juga dibantu biro-biro yaitu: *Sana panitra* (sekretariat), bale wisuda (urusan pegawai), dhatu wandawa Pemberian gelar bangsawan), Pembikinan peraturan negeri, *radya kintaka* (arsip), *bunen banikarti* (alat-alat kantor), *sandhi pura* (perhubungan karaton), *kundha pustaka* (Suwarno, 1994, p. 105).

Pembagian tugas horizontal menghasilkan tiga belas bagian yaitu bagian keuangan, bagian pengajaran, bagian pengadilan, bagian pekerjaan teknik, bagian perusahaan, bagian kesehatan rakyat, bagian urusan tanah, golongan, yayasan purbakala, penyuluh pertanian, urusan peternakan, pelbagai urusan sosial. Pembagian tugas secara vertikal menghasilkan satuan-satuan wilayah administratif dari atas ke bawah sebagai berikut: daerah istimewa (*kooti*), kabupaten (*ken*), kawedanan (*gun*), asistenan (*son*), dan kelurahan (*ku*) serta kemantren pangreh praja. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikepalai oleh Sultan Hamengku Buwono IX, membawahkan empat kabupaten yaitu: Kabupaten Yogyakarta dengan bupati K.R.T. Harjodiningrat, Kabupaten Bantul dengan bupati K.R.T. Dirjokusumo, Kabupaten Gunungkidul dengan bupati K.R.T. Joyodiningrat, Kabupaten Kulonprogo dengan bupati K.R.T. Pringgohadiningrat.

Tindakan Sultan yang memadukan birokrasi pemerintahan karaton dan nagari berarti Sultan melepaskan *pepatih dalem* dari kontrol penjajah yang dulu pernah dilakukan Belanda. Lewat *kawedanan kori* Sultan memegang seluruh pemerintahan dengan pengawasan Jepang. Dalam pengisian formasi kepegawaian Sultan berusaha sedapat mungkin mempertimbangkan keahlian yang sesuai dengan tugas yang diberikan kepada para birokratnya. Dalam membagi wilayah administratif Sultan mengadakan sedikit perubahan terhadap pembagian wilayah administratif tahun 1940. Kabupaten Yogyakarta yang semula terdiri atas dua distrik yaitu Distrik Kota dan Sleman kemudian dipecah menjadi 3 kawedanan dengan membagi Distrik Kota menjadi Kawedanan Kota dan Kalasan (Suwarno, 1994, p. 110).

Pada tahun 1943 untuk mendukung perubahan birokrasi Sultan mencurahkan perhatiannya pada rakyat terutama terhadap mereka yang tinggal di pedesaan. Bersama para pembantunya Sultan mengadakan kunjungan ke desa-desa dan menyusun perencanaan serta program-program untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sultan menjadwalkan kunjungan ke daerah-daerah di akhir Maret. Pada tanggal 6 April 1943 Sultan dan pengiringnya mengadakan kunjungan ke Gunungkidul, tanggal 7 ke Kulonprogo, tanggal 8 ke Bantul, dan tanggal 10 ke Yogyakarta Ken. Kunjungan ke Gunungkidul dilakukan bersama-sama *pepatih dalem*, B.P.H. Puruboyo, Tagauchi, dan

Sidarto. Sejak itu Sultan yang diiringi *pepatih dalem* dan pejabat teras Yogyakarta secara periodic mendatangi konferensi pangreh praja di kabupaten-kabupaten. Biasanya Sultan memulai konferensi itu dengan pidato pembukaan, kemudian disusul uraian mengenai pemerintahan Jepang oleh B.P.H. Puruboyo, dan disambung kepala-kepala bagiansesuai bidangnya. Dalam kunjungan itu Sultan menegaskan pendiriannya kepada wartawan yang meliputnya bahwa rakyat harus dibesarkan hatinya sebab mereka sangat menderita (Suwarno, 1994, p. 110).

Berdasarkan peninjauan ke daerah-daerah itu dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun dan memantapkan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan birokrasi pemerintahan yang diubahnya itu. Di tahun 1943 pemerintah Yogyakarta merencanakan program pembangunan dalam bidang pertanian, terutama pengairan serta pengenalan bibit unggul, peternakan, dan penghutanan kembali tanah yang kritis di Gunungkidul dan Kulonprogo. Perencanaan itu meliputi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berupa pembangunan pengairan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah, antara perbaikan tanggul sungai code, perbaikan pengairan di Pakem, Bulus, dan Bedoyo, perbaikan tanggul Opak di sekitar Kretek. Perbaikan ini dimaksudkan untuk menghindarkan sawah dari amukan banjir di musim penghujan. Proyek jangka panjang berupa penghutanan kembali daerah-daerah kritis. Pada waktu itu menurut Dinas Kehutanan di Yogyakarta ada 6% luas hutan dari 20% luas hutandi Jawa. Maka untuk mengusahakan kesuburan tanah di Kabupaten Kulonprogo yaitu dengan menanami bukit-bukit gundul pohon tahun seluas 6.346 ha. Proyek ini akan selesai selama 20 tahun. Proyek yang sama juga dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk meningkatkan ternak di Gunungkidul didatangkan 4 ekor kuda, 49 ekor lembu Benggala, dan beberapa kambing jantan pemacek dari daerah lain.

Di bidang pertanian kecuali padi direncanakan penanaman jarak, kapas, dan jagung. Di Yogyakarta Kooti menurut rencana akan ditanam jarak seluas 3.000 ha, dengan rincian setiap kabupaten mendapat jatah 750 ha, tetapi ternyata di Gunungkidul saja sudah ditanam jarak seluas 4.000 ha. Jagung akan ditanam seluas 2.000 ha. Kapas baru dicoba di Kulonprogo untuk memastikan tanah yang cocok.

Sultan juga memperhatikan kerajinan rakyat. Dia menjanjikan hadiah berupa modal untuk rakyat yang menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk umum. Salah satu contoh yaitu Suparman yang berhasil menemukan plumber kendaraan yang semula diimpor dari luar negeri, diberi modal secukupnya untuk mengembangkan usanya. Kecuali itu juga digalakkan pembuatan kantong garam dari rumput mending yang dipesan oleh pabrik garam kalianget. Dari pabrik-pabrik kapal pengrajin itu mendapat pesanan tambang-tambang (tali) besar (Suwarno, 1994, p. 112).

Di bidang sosial Sultan juga memberi perhatian pada kehidupan sosial rakyat, misalkan di bidang pendidikan. Sultan menginstruksikan agar sifat colonial yang memperluas semangat perbudakan dihapus. Menurut dia pendidikan sekarang harus mendidik kesederhanaan (berhemat), bertanggung jawab, mandiri, menanamkan rasa kebangsaan dan mempertinggi kebudayaan serta kesenian. Pada bidang kesehatan rakyat didirikan rumah sakit di Pakem. Di rumah sakit ini dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat-obat Jawa yang khasiatnya telah diperiksa oleh dokter. Di samping itu juga diadakan kursus kilat selama tiga bulan untuk juru khitan.

Demi menjamin keberhasilan program-program itu, kecuali mencari subsidi dana dari Jepang, Sultan juga melanjutkan hubungan yang sudah diadakan dengan organisasi-organisasi sosial untuk mendapatkan dukungan, dan mengadakan pembinaan lebih lanjut terhadap pegawai serta sarana yang terkait. Pada bulan Mei Sultan mempererat hubungannya dengan Taman Siswa dengan menyerahkan tenaga guru menggambar untuk mengajar di Taman Dewasa. Sultan juga mengirim surat penghargaan kepada Muhammadiyah, karena kegiatan badan-badan amal yang didirikannya (Suwarno, 1994, p. 113).

Sultan dalam mengubah sikap mental para pegawainya mengeluarkan instruksi lewat pepatih dalem tanggal 24 Agustus 1945. Isi instruksi tersebut sebagai berikut

- 1) Para pegawai harus memperkokoh persatuan bangsa dan menghindari percekocokan yang menyakitkan hati orang lain.
- 2) Hendaknya para pegawai tidak hidup membujang, kalau tidak ada alasan yang sah, sebab hidup membujang cenderung boros, hidup tak teratur, serta rawan kesukilaan.
- 3) Mereka harus berhemat, tidak berjudi, dan tidak mudah meminjam uang.

Dalam instruksi ini sultan menekankan butir kedua dan menekankan bagi mereka yang membina para pemuda supaya memberi teladan yang baik. Butir kedua instruksi Sultan itu juga diperuntukkan bagi semua pemuda, dan pangreh praja hal ini dikaitkan dengan upaya Sultan untuk mencegah agar pemuda tidak dikerahkan menjadi romusha karena telah berkeluarga (Suwarno, 1994, p. 114).

Menurut Darmosugito di surat kabar *Soeara asia* tentang sangat berbedanya *pangreh praja* di zaman Jepang dan Zaman Belanda. Pada Zaman Belanda mereka tidak mendapat kepercayaan, sehingga kedudukannya tak berbeda dengan perkakas. Hubungan mereka dengan rakyat tidak ada, bahkan orang-orang yang mengerti tatanegara berpendapat bahwa pangreh praja adalah perkakas untuk penindasan. Pada zaman Jepang pepatih dalem lah yang menyerahkan segala pekerjaan kepada pegawai. Mereka diberi kemerdekaan seluas-luasnya. Hubungan pangreh praja dengan rakyat semakin dekat. Hal ini terbukti saat tanggul sungai Kretek bobol karena banjir, rakyat dengan mudah diajak memperbaikinya, sehingga cepat selesai dan hanya menelan biaya 20% dari biaya seharusnya (Suwarno, 1994, p. 114).

Sultan juga mendorong para birokrat dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat di luar Yogyakarta guna memperluas pandangan dan memperdalam pengetahuan, sehingga mereka mampu menjadi pendukung perubahan birokrasi yang sedang berlangsung. Pada tanggal 5 Maret 1943 *pepatih* kasultanan, *pepatih* paku alaman, dan para *kentyoo* Yogyakarta Kooti bertemu empat serangkai pemimpin pusat tenaga rakyat (Putera) di rumah Ir. Sukarno. Mereka berbincang-bincang selama dua jam tentang kerjasama dalam mewujudkan masyarakat baru. Setelah itu mereka bertamu di rumah Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 6 Juli, Sultan, Paku Alam, Paku Buwono, dan Mangku Negoro bertemu dengan *Saiko Sakikian*. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Perdana Menteri Toojoo yang berkunjung ke Jakarta (Suwarno, 1994, p. 114-115).

Tanggal 30 Juli 1943 Sultan mengirim empat orang ke Jepang. Dua orang untuk melanjutkan pelajarannya, sedangkan yang lainnya untuk bergabung dengan rombongan peninjau dari Jawa yang dikirim oleh *Gunseikan* untuk mengenal dan mempelajari pembangunan di Jepang yang dapat dikembangkan di Jawa. Rombongan ini berjumlah 20 orang terdiri atas pegawai negeri dan tokoh masyarakat di bawah pimpinan Sutarjo Kartohadikusumo dan berangkat dari Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1943. Dua orang yang akan melanjutkan pelajaran adalah R.M. Suharji (saudara pepatih dalem, siswa SMP) dan R.M. Kustijo (siswa SMT). Dua orang yang bergabung dengan rombongan Sutarjo adalah K.R.T. Notonegoro (Kepala I Agnya praja) dan R.Ng. Sugardo Purbokawoco (guru SMT). K.R.T. Notonegoro diberi tugas mengamati dan mempelajari organisasi pusat pemerintahan. R.Ng. Sugardo Purbokawoco bergabung dengan kelompok yang mempelajari adat istiadat, kesenian serta kebudayaan, perkumpulan pemuda serta olah raga, pengajaran serta pendidikan, sekolah rakyat, sekolah menengah, sekolah tinggi, dan pendidikan wanita. Rombongan ini tiba kembali di Jawa pada tanggal 27 Oktober 1943 (Suwarno, 1994, p. 115).

Kedudukan Jepang tahun 1943 dalam perang melawan sekutu berubah dari pihak penyerang menjadi pihak bertahan, bahkan pada tanggal 22 Juli sekutu telah menjatuhkan bom di Surabaya, sehingga *Gunseikan* Sinhitiro Kokubu sendiri sehari setelah kejadian itu telah berada di Surabaya untuk menenangkan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu wajarlah kalau Jepang memberi kesempatan kepada penduduk Jawa untuk ikut mengambil bagian dalam pemerintahan seperti yang diumumkan oleh *Seiko Sikikan* pada tanggal 1 Agustus 1943. Tanggal 5 September dikeluarkan osamu seirei No. 36 tentang *tyuoo sangi-in* sebagai lembaga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan pusat dan dikeluarkan osamu seirei no. 37 tentang *syuu dan tokubetu Si sangikai*. Di Yogyakarta tidak dibentuk kooti sangi-kai, tetapi Sultan diberi wewenang untuk mengusulkan dua anggota *tyuoo sangi-in* dan disertai sejumlah urusan pemerintahan. Penyerahan urusan itu disambut baik oleh sultan dan dimanfaatkannya untuk melanjutkan perubahan birokrasi pemerintahan yang dasarnya telah diletakkan akhir tahun 1942. Ada 9 urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Sultan sebagai Yogyakarta *koo* yaitu sekolah negeri dan pengawasan sekolah swasta, sensus dan pencatatan penduduk asli, hak milik dan pemindahan hak milik antar penduduk asli, sebagian kantor kesehatan dan fasilitasnya, penyuluhan pertanian dan kantor penerangan industri, kemudahan bantuan bagi penganggur dan fakir miskin, penjatahan, penyerahan barang, dan pengendalian ekonomi, pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pegadaian, pencatatan ternak. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan itu Sultan mengadakan reorganisasi pemerintahan yang baru saja dibenahi akhir Desember 1942. Dalam reorganisasi ini secara eksplisit Sultan menginstruksikan untuk mengadakan pembagian tugas secara horizontal lebih tegas dengan pejabat-pejabat yang sedapat mungkin memiliki spesialisasi sesuai dengan tugasnya. Instruksi ini ditujukan kepada pepatih dalem dengan surat 19 Desember 1944. Bersama surat itu dilampirkan terdahkan susunan kantor Yogyakarta- *koo kooti*. Pembagian tugas secara horizontal menghasilkan 6 bagian (*bu*) dan masing-masing bagian membawahi sub-bagian. Enam bagian tersebut adalah panitera (*kanbu*), rancangan propaganda (*kikubu sindenbu*), urusan umum (*soomubu*), bagian pengajaran (*bunkyobu*), bagian ekonomi (*keizeibu*), bagian yayasan umum (*dobokubu*) (Suwarno, 1994, p. 116-117).

Pada bulan Mei 1944 Sultan mengadakan perjalanan keliling ke kabupaten-kabupaten memimpin konferensi pagreh praja. Dalam setiap kesempatan Sultan menganjurkan kepada mereka untuk menjelaskan kepada rakyat mengenai perubahan pemerintahan itu sejelas-jelasnya dan mendorongnya untuk melipatgandakan produksi serta mencukupi kebutuhan rakyat setempat. Dalam kesempatan-kesempatan pertemuan dengan pangreh praja Sultan tidak jemu-jemunya menganjurkan agar mereka sabar dan memperhatikan keadaan rakyat, tidak sombong, dan menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas. Dengan demikian kepercayaan kepada pangreh praja tentu akan timbul. Anjuran sultan itu diterima dengan takzim dan dianggapnya sebagai pusaka (Suwarno, 1994, p. 120).

Di tahun 1944 ini Sultan diminta Jepang keliling Jawa untuk mempengaruhi masyarakat agar lebih taat kepada Jepang. Akan tetapi kesempatan ini justru dimanfaatkan oleh Sultan untuk mencari masukan dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan Yogyakarta yang baru diperbaruinya. Pada tanggal 11 Mei sultan dan pengiringnya berangkat keliling Jawa dan tanggal 13 Mei Sultan dan pengiringnya tiba di Cirebon, terus menuju ke Bandung, Cikotok, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Pada tanggal 23 Mei rombongan tiba di Banyumas, kemudian ke Purwokerto, dan Cilacap. Pada tanggal 25 Mei sultan dan pengiringnya tiba di Yogyakarta kembali. Di tempat-tempat yang dilalui sultan meninjau tambang emas Cikotok, pabrik tenun dan cat di Sukabumi, pabrik gerabah dan sepon di banjarnegara. Sultan juga mengunjungi sekolah-sekolah kejuruan yang berhubungan langsung dengan pembangunan dan keamanan seperti Sekolah Menengah Tinggi Pertanian dan kebun percobaannya di Bogor, sekolah Polisi di Sukabumi, sekolah mantri kesehatan di banyumas, dan sekolah pelayaran di cilacap, makam lutung kesarung cerita legendaris Purwokerto. Kecuali itu rakyat dipersiapkan dengan memberi pendidikan dan pengalaman langsung dalam pembangunan seperti percobaan penanaman padi gogo di Kulonprogo. Untuk memberi pengetahuan yang cukup untuk hidup di desa maka sekolah pertama ditambah satu tahun. Sultan juga mempersiapkan 10.000 orang tenaga pengajar untuk memberantas buta huruf di seluruh Yogyakarta (Suwarno, 1994, p. 120).

Banyak lembaga sosial yang dibina pada zaman Jepang merupakan alat efektif bagi birokrasi pemerintahan untuk menggerakkan rakyat. Pada tanggal 29 april 1943 di Yogyakarta dibentuk Seinendan (untuk pemuda berumur 14-23 tahun dan dipersiapkan untuk menjaga tanah airnya kelak di kemudian hari) dan keibodan (untuk pemuda berumur 25-35 tahun untuk membantu pekerjaan polisi). Pada tanggal 5 juli 1943 didirikan Putera dengan ketuanya B.P.H. Suryodiningrat dan wakilnya Dr. Sukirman, tetapi pada tanggal 9 Maret 1944 dibubarkan dan diganti gerakan Jawa Hookookai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa). Pada tanggal 8 Januari 19 44 pemerintah pendudukan Jepang memerintahkan untuk menyempurnakan *Tonari Kumi* (rukun dusun) dan *Azazyokai* (rukun somah). Tujuan utama lembaga *Tonari Kumi* dan *azazyokai* itu membantu pemerintah untuk mencapai kemenangan akhir dan membangun Jawa baru. Adapun cara yang ditempuh adalah Tonari kumi harus menjadi suatu badan untuk bekerja nyata dalam hal membela tanah airdan mengatur ekonomi di tempatnya masing-masing., menjadi bagian terbawah dari birokrasi pemerintah yang harus meneruskan program pemerintah kepada penduduk, menjalankan kewajibannya dengan gotong-royong. Untuk *Hookookai* bertujuan agar semua orang Jawa menjalankan kewajibannya mengorbankan segala yang dimiliki dan

jiwa raganya untuk mencapai kemenangan akhir dalam perang suci. Caranya yaitu menjalankan semua rencana Jepang dengan penuh rasa persaudaraan dengan semua orang, sehingga segera tercapai tujuan perang asia raya yaitu masyarakat bqr di Jawa sebagai warga yang kuat dalam lingkungan Asia Timur Raya (Suwarno, 1994, p. 121-124).

Di saat mendekati akhir 1944 Jepang merasa kekalahan sudah semakin dekat, maka semua kemungkinan digunakan untuk mengadakan perlawanan. Selain menggunakan birokrasi pemerintahan untuk menggerakkan hookookai yang bersifat social ekonomi jepang juga memanfaatkannya untuk menyebarkan budaya guna mengobarkan semangat perjuangan masa melawan sekutu seperti Kolonel Takahashi mengubah lagu bengawan Solo diubah menjadi negeri sekutu (Suwarno, 1994, p. 125).

Sementara Sultan berusaha mencari peluang-peluang untuk melaksanakan birokrasi pemerintahan yang terlepas dari control Jepang, Pemerintah Jepang mengumumkan pernyataan Koiso bahwa kemerdekaan Indonesia akan ditetapkan dalam waktu dekat, yang merupakan sarana penunjang bagi perubahan birokrasi pemerintahan yang dilakukan Sultan. Pernyataan Koiso ini merupakan perwujudan dari pemikiran yang dirumuskan oleh Kyuujiro Hayashi kepala Administrasi Sipil Angkatan Darat tanggal 20 Maret 1944. Rumusan pemikiran ini didasarkan laporan survai yang menyatakan bahwa rakyat Jawa yang jumlahnya mencapai separoh wilayah jajahan Jepang hidup tenang dan bekerjasama dengan pemerintah Jepang serta sebagai basis sumber bahan mentah.. Tetapi sejak akhir tahun lalu hasil tahun kurang baik, kurang bahan makanan karena diserahkan untuk perang, kurang bahan pakaian sehingga akan menyebabkan keamanan dan ketertiban menjadi kritis. Pemuka masyarakat, kaum intelektual, dan pemuda sekarang bekerja sama dengan pemerintah tentara Jepang tidak hanya demi kemenangan Jepang tapi harapan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Pernyataan kemerdekaan Indonesia akan ditetapkan di hadapan sidang ke-85 parlemen Jepang tanggal 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Jepang Koiso (Suwarno, 1994, p. 128).

Pada tanggal 14 Juli 1945 *pepatih dalem* yang sudah tua yaitu 63 tahun dan sakit-sakitan secara resmi diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri. Jabatan *pepatih dalem* yang ada sejak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I ditiadakan, dan Sultan sepenuhnya mambawahkan parentah *nagari* dengan dibantu oleh *parentah luhur* yang dipimpin dua orang saudara Sultan yaitu B.P.H. Puruboyo dan B.P.H. Bintoro. Keduanya pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). B.P.H. Puruboyo selanjutnya akan diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan demikian Sultan selalu mendapat keterangan dari tangan pertama mengenai perkembangan politik di Jakarta sampai saat proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia. Tanggal 17 agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia yang berarti terlepas dari penjajahan Jepang yang saat itu berkuasa di Indonesia (Suwarno, 1994, p. 142-146).

### **Membela Negara Republik Indonesia**

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Kantor Domei Yogyakarta menerima berita radiografis dari domei Pusat Jakarta mengenai proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian wartawan

Domei menyebarkan dari mulut ke mulut, dan sore harinya Ki Hajar Dewantara mengadakan pawai sepeda keliling kota untuk menyambut proklamasi kemerdekaan itu (Suwarno, 1994, p. 165-166).

Tanggal 18 Agustus sore Sultan dan Paku Alam mengirim ucapan selamat kepada Sukarno dan Moh. Hatta yang telah menjadi presiden dan wakil presiden. Kecuali itu dikirim kawat kepada Rajiman Wediodiningrat, surat ucapan terima kasih kepada *Nampoo-Gun saiko Sikikan kakka* dan Jawa *Saiko Kooti Hookookai* beserta stafnya. Pada tanggal 20 Agustus Ketua Yogyakarta *Kooti Hookookai* mengirim ucapan selamat kepada Presiden dan wakil Presiden atas lahirnya Negara Indonesia dan pernyataan siap berdiri di belakang Presiden dan wakil presiden. Tanggal 1 September dengan persetujuan Sultan, polisi termasuk polisi Istimewa (PI) di bawah pimpinan R.P. Sudarsono mengeluarkan maklumat yang menyatakan dirinya sebagai polisi RI dan akan menghukum keras segala tindakan yang menentang Negara RI (Suwarno, 1994, p. 166).

Rakyat terutama pemuda sangat bersemangat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan juga bermakna komando dan sekaligus merupakan perintah harian untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dari tangan Pemerintah tentara Jepang kepada bangsa Indonesia. Para pemuda itu membentuk kelompok-kelompok yang menjurus ke organisasi dari yang longgar sampai yang agak ketat. Kelompok yang membentuk organisasi yang agak longgar seperti Angkatan Muda Pathook dengan pemimpinnya Kusumo Sunjoyo, Angkatan Muda Jagalan Paku Alaman dengan pemimpinnya Faridan, Angkatan Muda Jetis dengan pemimpinnya Parmadi Joi, Angkatan Muda Gowongan dengan pemimpinnya Wagiyono. Kelompok-kelompok itu dibina kelompok Syahrir. Mantan Peta, Heiho, dan Kaigun yang kembali ke kampung halamannya membentuk kelompok produktif, sebagian bergabung dengan kelompok yang sudah ada, dan sebagian membentuk kelompok militan yang siap menyambut proklamasi kemerdekaan. Kelompok organisasi yang agak ketat seperti Gabungan Sekolah Menengah Mataram (Gassema) ketika proklamasi diumumkan menyambut dengan rencana akan mengadakan kongres perwakilan dengan sekolah-sekolah menengah seluruh Jawa di Yogyakarta (Suwarno, 1994, p. 166).

Para tokoh politik yang tinggal di Yogyakarta baik yang bekerjasama dengan Jepang maupun yang berjuang di bawah tanah berada di tengah kelompok-kelompok itu dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh politik yang di Jakarta seperti Moh. Asrar yang selalu berhubungan dengan Sartono dan Sukarno. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta sudah siap menyambut proklamasi kemerdekaan mulai dari Sultan beserta kookai, tokoh-tokoh masyarakat, sampai rakyat jelata. Mereka sudah mendambakan kemerdekaan sejak pernyataan koiso yang terkenal itu.

Di Yogyakarta pembentukan Komite nasional Indonesia Daerah (KNID) diprakarsai oleh kelompok nasionalis tua yang mempunyai hubungan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis di Jakarta antara lain Moh. Asrar. Bersama Marlan, Moh. Asrar mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh kooti hookookai dan tokoh lain di jalan Ngabean dipimpin R.M. Sosrosudirjo. Terbentuklah KNID yang

beranggotakan 32 orang dan menjadi 84 serta 3 penasehat karena kebutuhan yang menghendaki banyak kelompok masyarakat masuk. Pada tanggal 1 September di Yogyakarta juga dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang merupakan badan bagian dari Badan Penolong Korban-korban Perang (BPKKP). BKR Yogyakarta beranggotakan mantan Peta, Heiho, Seinen Korenso, Seinendan, Keibodan, barisan Berani Mati, Hisbullah, Sabilillah, Barisan Pelopor, Tentara rakyat, dan sebagainya. Tugasnya menjamin keamanan dan ketentraman rakyat (Suwarno, 1994, p. 167-170).

Sultan mengadakan pembicaraan dengan Paku Alam, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lain termasuk Sudarisman Purwokusumo setelah terbentuknya KNID dan BKR. Dari pembicaraan itu Sultan dapat menyimpulkan bahwa rakyat Yogyakarta menyambut hangat proklamasi kemerdekaan itu. Dengan demikian barulah Sultan siap bicara atas nama rakyat dengan mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang diikuti oleh Paku Alam pada tanggal yang sama. Amanat ini berisi tiga pernyataan yaitu:

- 1) Kerajaan Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa Negara RI.
- 2) Semua kekuasaan dan urusan pemerintahan DIY dipegang sepenuhnya oleh Sultan.
- 3) Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Amanat 5 september ini dapat disebut sebagai proklamasi kemerdekaan Yogyakarta dari penjajahan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Yogyakarta ini kata-katanya lebih radikal daripada proklamasi 17A gustus sebab kekuasaan dan pemerintahan langsung dinyatakan diambil secara penuh oleh Sultan dan Paku Alam pada saat amanat (proklamasi) itu dinyatakan. Amanat ini menunjukkan keberanian Sultan dan Paku Alam karena mengandung resiko tinggi yang dihindari tokoh-tokoh tua di Jakarta. Hal ini melihat pemerintahan Jepang yang masih menduduki pos-pos pemerintahan di Yogyakarta dengan kekuatan militer yang masih segar bugar dengan bersenjata lengkap di Pingit, Kotabaru, dan Maguwo. Bulan September itu bendera merah putih dikibarkan di rumah-rumah penduduk dan bangunan milik pemerintah kasultanan. Sultan memperhitungkan dengan cermat kekuatan yang ada pada pihaknya yaitu tokoh politik, kaum intelektual, pemuda, dan rakyat. Sultan memandang Jepang memang tidak terlalu berat tapi Sultan justru mengkhawatirkan belanda yang diduga akan datang kembali di Yogyakarta. Untuk itu Yogyakarta dinyatakan daerah Istimewa di bawah Negara RI dipimpin presiden dan wakil presiden. Dengan demikian dia tidak bisa diadu domba dengan tokoh politik dan cendikiawan di Jakarta (Suwarno, 1994, p. 170-171).

Amanat 5 September 1945 tersebut seolah-olah mendapat legalisasi dari Pemerintah RI yaitu ketika dua orang menteri utusan Presiden RI datang ke Yogyakarta tanggal 6 September 1945 untuk menyerahkan piagam kedudukan Sultan dan Paku Alam. Piagam itu berisi pengakuan bahwa Sultan dan Paku Alam tetap pada kedudukannya dan Yogyakarta serta Paku Alaman merupakan bagian RI.

Bulan September dan Oktober 1945 keadaan menjadi tegang di satu pihak proklamasi kemerdekaan sudah diumumkan dan Sudah Amanat 5 September, tetapi Jepang masih berkuasa. *Kooti zimu Kyoku Tyookan* masih menduduki istananya dan tentara Jepang masih memegang senjata lengkap. Dalam keadaan ini kelompok-

kelompok rakyat melakukan gerakan-gerakan mewujudkan kemerdekaan. Gerakan ini berupa perampasan senjata dan mobil milik Jepang seperti yang dilakukan Angkatan Muda Gowongan dan Angkatan Muda Pathook, maupun dengan perundingan seperti dengan agar mereka menyerahkan senjata kepada rakyat Indonesia. Kecuali mengumpulkan senjata di sana-sini para pemuda ini juga memmatangkan masyarakat dengan menyebarkan simbol-simbol kemerdekaan di masyarakat seperti pekik kemerdekaan, pemasangan lencana merah-putih di dada, penurunan bendera Jepang dan Belanda di gedung pemerintah diganti bendera merah putih (Suwarno, 1994, p. 173-174).

Pada tanggal 27 September 1945 kekuasaan pemerintahan Yogyakarta seluruhnya telah berada di tangan bangsa Indonesia. Selanjutnya diberitahukan bahwa sejak saat itu kekuasaan pemerintah Yogyakarta telah di tangan kedua Sri Paduka yaitu Sultan dan Paku alam serta KNID. Keadaan yang revolusioner yang disetujui Sultan tersebut menyebabkan orang-orang asing di Yogyakarta gelisah, maka KNID mengeluarkan pengumuman agar mereka tetap tenang dan keselamatan mereka akan dijamin selama tunduk pada segala aturan Pemerintah Republik Indonesia dan mereka berada di Negara lain yang sudah merdeka (Suwarno, 1994, p. 178).

Pada pemerintahan RI terjadi perubahan sistem pemerintahan yang diatur dengan maklumat pemerintah No. X yang ditandatangani wakil presiden. Maklumat ini mengubah kedudukan KNIP dari pembantu presiden menjadi badan legislatif dan bersama-sama presiden menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Sesuai dengan perubahan itu KNID membentuk badan pekerta tanggal 29 Oktober 1945. Sultan menyerahkan kekuasaan membuat undang-undang dan menetapkan haluan kasultanan Yogyakarta kepada BPKNID, wakil rakyat Yogyakarta, supaya jaln pemerintahan sesuai UUD RI (Suwarno, 1994, p. 186).

Pada tanggal 13 Februari 1946 Sultan dan Paku Alam dengan persetujuan BPKNID mengubah istilah pangreh praja menjadi pamong praja dengan menggunakan maklumat no. 10/1946. Pangreh praja berarti orang yang menguasai pemerintahan, sedangkan pamong praja orang yang mengasuh pemerintahan. Perubahan ini diadakan dengan pertimbangan bahwa pangreh praja di kalangan rakyat mengingatkan zaman penjajahan. Selain itu kedudukan dan kewajiban pamong praja berbeda di negara yang sudah merdeka dengan zaman penjajahan dulu (Suwarno, 1994, p. 214).

Mulai tanggal 4 Januari 1946 pusat ibukota Negara RI pindah ke Yogyakarta dari Jakarta. Hal ini dikarenakan keadaan keamanan di Jakarta yang semakin memburuk akibat aksi terror serdadu Belanda. Melihat kondisi ini Sultan menawarkan kepada kepada Sukarno dan Hatta Yogyakarta dijadikan ibukota RI melalui surat tanggal 2 januari 1945. Sidang cabinet 3 Januari 1946 memutuskan memindahkan pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Pada malam harinya Presiden dan Wakil Presiden beserta rombongan bertolak ke Yogyakarta dengan naik kereta api barang menghindari sergapan tentara Belanda. Tanggal 4 januari 1946 Presiden dan rombongan tiba di Stasiun Tugu disambut Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Tim Penyusun, 2017, p. 205).

Dampak pemindahan ini Yogyakarta dibanjiri penduduk dari semula 170.000 menjadi 600.000 jiwa. Hal ini membuat kesulitan dalam pemenuhan perumahan untuk

keperluan perkantoran kementerian dan jawatan maupun tempat tinggal. Untuk mengatasi kesulitan ini Sultan Hamengku Buwono IX segera memberikan fasilitas gedung dan bangunan milik kasultanan untuk dipinjamkan untuk dimanfaatkan. Kesulitan lain pemerintahan di Yogyakarta adalah minimnya dana. Untuk mendapatkan uang melakukan berbagai cara seperti menyelundupka penjualan candu atau cerutu dari Jawa ke Singapura, Hongkong, Bangkok, Manila dengan menembus blokade Belanda. Di samping itu Sultan rela membuka kas kerajaan untuk menggaji seluruh pegawai dan instansi pemerintahan RI (Tim Penyusun, 2017, p. 205-206).

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan aksi militernya yang kedua dengan sasaran ibukota Yogyakarta setelah gagal aksi militer tahu 1947 karena resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah berhasil menduduki lapangan terbang Maguwo Belanda segera menyerbu Kota Yogyakarta. Hal ini membuat rakyat bingung sehingga sebagian mengungsi ke kerato dan keluar kota. Sri sultan hamengku Buwono IX menenangkan orang-orang yang mengungsi. Sultan memerintahkan menutup pintu gerbang keraton. Seorang kapten Belanda minta bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tetapi keduanya tidak bersedia menerima. Dalam usaha membentuk pemerintahan pendudukan Belanda mengalami kegagalan karena semua pegawai daerah dan ketua rukun kampung menolak membantu Belanda (Tim Penyusun, 2017, p. 209-210).

Pada tanggal 22 Desember 1948 Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta serta pembesar lain ditangkap dan dibawa ke luar Yogyakarta untuk diasingkan di Berastagi dan di pindahkan ke Parapat dan Bangka. Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak ditangkap dengan harapan mau bekerjasama namun ditolak karena lebih baik binasa daripada jadi penghianat. Kepada pamong praja supaya jangan sampai jatuh ke tangan Belanda meskipun tempatnya diduduki. Kantor kepatihan ditutup, semua pegawai dilarang bekerjasama dengan Belanda. Di tengah kondisi sosial politik tidak menentu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam tetap pemegang kendali di Yogyakarta. Secara rahasia Sultan dan Paku Alam selalu mengadakan koordinasi dengan Bupati dan militer (Tim Penyusun, 2017, p. 210-211).

Pada bulan Februari 1949 Sultan mengirimkan surat kepada Panglima Besar Sudirman minta izin agar diadakan serangan umum tapi di siang hari. Hal ini disetujui dan supaya berhubungan langsung dengan komandan yang bersangkutan yaitu Letkol Suharto. Tanggal 14 Februari 1949 Letkol Suharto dan Sultan mengadakan pertemuan empat mata di Dalem Prabuningratan untuk membicarakan serangan umum. Tanggal 1 maret 1949 pukul 03.00 dini hari tentara gerilya dari luar kota sudah berdatangan dengan memakai tanda pengenal daun kelapa muda (janur kuning). Waktu sirene Belanda berbunyi tentara gerilya serentak menyerbu dan menduduki sasaran yang ditentukan. Mereka berhasil menguasai selama enam jam. Dengan serangan ini rakyat dan Dewan Keamanan PBB diyakinkan bahwa Belanda tidak berhasil memerintah rakyat Yogyakarta, sedangkan pemerintah RI masih efektif, walaupun pemerintahan ditutup (Suwarno, 1994, p. 246-247).

Berdasarkan Roem-Royen statemen tanggal 7 Mei 1949 dalam melaksanakan petunjuk Dewan keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949 serta pasal 1 dan 2 dalam bagian penyelenggaraan dan resolusi dewan keamanan PBB tanggal 28 januari 1949 telah

disepakati bersama antara RI dan Belanda untuk melaksanakan perintah penghentian permusuhan. Sebagai realisasinya maka pada tanggal 29 Juni 1949 tentara Kerajaan Belanda ditarik dari Bumi Indonesia melalui ibukota Yogyakarta. Setelah itu berangsur-angsur pimpinan RI dan pejuang Indonesia masuk kembali ke ibukota Yogyakarta (Tim Penyusun, 2017, p. 216).

Sehari setelah pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia sebagai salah satu hasil KMB pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Sukarno kembali ke Jakarta. Peristiwa ini menandai berakhirnya fungsi Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Sultan menyumbangkan 6 Juta gulden untuk membantu pemerintahan Indonesia karena Pemerintah Indonesia saat itu tidak punya lagi biaya untuk menjalankan pemerintahan (Tim Penyusun, 2017, p. 217).

## PENUTUP

Upaya Sultan Hamengku Buwono IX demi mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka telah di mulai sejak awal pemerintahan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta tanggal 18 Maret 1940. Saat awal pemerintahan Sultan harus menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Sultan tindak segera menandatangani kontrak politik tersebut karena berusaha menghapuskan tugas pepatih dalem yang ditugasi Belanda mengawasi pelaksanaan pemerintahan Sultan. Ini adalah usaha Sultan membebaskan diri dari penjajah. Pada pidato pengukuhan yang isinya antara lain akan menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan sendiri dan akan bekerja untuk nusa dan bangsa sebatas kemampuan dan pengetahuannya. Pada masa ini pemerintahan Yogyakarta bisa dikatakan terbagi dua yaitu ada pemerintahan *karaton* yang dipimpin langsung Sultan dan pemerintahan *nagari* yang dijalankan pepatih dalem. Pada saat Belanda berkuasa Sultan tidak bisa bertindak bebas dalam melaksanakan kebijakan karena diawasi oleh *pepatih dalem* yang ditugasi Belanda. Saat Jepang menduduki Yogyakarta ada perubahan yaitu *pepatih dalem* berada di bawah sultan yang tidak lagi mengawasi Sultan. Hal ini karena Jepang lebih mempercayakan Pemerintahan Yogyakarta kepada Sultan agar dapat menyumbangkan bahan mentah untuk melawan Sekutu. Pada masa kemerdekaan Sultan dengan pemerintahan di Yogyakarta senantiasa mendukung Pemerintahan RI seperti tahun 1946 ibukota Negara di pindah ke Yogyakarta karena suasana yang tidak menentu di Jakarta akibat serbuan tentara Belanda. Kantor dan gedung milik kasultanan dipinjamkan untuk kantor Pemerintahan RI tempat tinggal jawatan pemerintahan. Saat itu minim dana keuangan berbagai cara dilakukan seperti menyelundupkan cerutu atau candu dari Jawa ke Singapura, Hongkong, Bangkok, Manila menembus blockade Belanda. Disamping Sultan sampai membuka kas kerajaan untuk membiayai Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta itu. Pada tanggal 1 Maret 1949 Sultan menjadi salah satu tokoh sehingga serangan tersebut bisa terwujud menguasai ibukota RI di Yogyakarta sehinggamembuktikan bahwa pemerintah RI masih efektif. Sehari setelah pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia sebagai salah satu hasil KMB pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Sukarno kembali ke Jakarta. Peristiwa ini menandai berakhirnya fungsi Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Sultan menyumbangkan 6 Juta gulden untuk membantu pemerintahan Indonesia karena Indonesia saat itu tidak punya lagi biaya untuk menjalankan pemerintahan.

## REFERENSI

- Abdurrahman, Dudung. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Atmakusumah. (1982). *Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: Gramedia.
- Buwono V, Sultan Hamengku. (1847). *Serat Wuruk Respati*.
- Darban, Adaby. (1998). *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamenku Buwana IX*. Jakarta: Depdikbud.
- Eswe, M.A. Rumawe. (2008). *Ngarsa Dalem Dundum Warisan*. Yogyakarta: LKiS.
- G. Moedjanto. (1994). *Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- [https://www.kratonjogja.id/Sri sultan Hamengku Buwono IX](https://www.kratonjogja.id/Sri_sultan_Hamengku_Buwono_IX).
- [https://www.kumparan.com/youtube/Menjaga Keraton di Tengah Perubahan](https://www.kumparan.com/youtube/Menjaga_Keraton_di_Tengah_Perubahan).
- [https://www.wikipedia.org/wiki/ Hamengkubuwana\\_IX](https://www.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_IX).
- Jandra, Mifedwil, et al. (2006). *Konsep Moral dan Pendidikan dalam Manuskrip Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: YKII UIN Sunan Kalijaga.
- Jirhanudin. (2010). *Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. (1993). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Karim, M. Abdul. (2007). *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Karim, M. Abdul. (2014). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara Yogyakarta.
- Margana, S. (2004). *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation.
- Maryam, Siti. (2002). *Sejarah Peradaban Islam, Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Munslow, Alun. (2003). *The New History*. England: Pearson Education Limited.
- Nurhajarini, Dwi Ratna, et al. (2012). *Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Yogyakarta.
- Pangesti, Rama Ageng. (2007). *Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Ningrat.
- Poerwokoesoemo, Soedarisman. (1981). *Sebuah Tinjauan tentang Papatih Dalem*. Yogyakarta: Proyek Javanologi.
- Pour, Julius dan Nur Adji (Eds.). (2012). *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat 100 Tahun Sultan IX*. Jakarta: PT Kompas Media Indonesia.
- Purwadi. (2006). *Sejarah Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX*. Yogyakarta: Hanan Pustaka.

- Setiawan, Otono. (2001). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Soeratnoet, Chamamah. et al. (ed). (2004). *Kraton Yogyakarta: the history and cultural heritage (2nd print)*. Yogyakarta and Jakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat and Indonesia Marketing Associations.
- Suwarno, P.J.. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penyusun. (2017). *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta tanpa penerbit.
- Yatim, Badri. (1995). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunita et al. (2004). *Karya Tulis Ilmiah Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yuniyanto, Tri. (2010). *Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat: Demokratisasi Pemerintahan di Yogyakarta*. Surakarta: Penerbit Cakra Books.
- Yusuf, Mundzirin.(2014). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: SUKA Press.